Akuntansi Pajak dan Kebijakan Ekonomi Digital
Volume. 3, Nomor. 4, November 2026
e-ISSN : 3046-8132; dan p-ISSN : 3046-868X; Hal. 91-104
DOI: https://doi.org/10.61132/apke.v3i4.2800
Tersedia: https://ejournal.areai.or.id/index.php/APKE

Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan dan Pengawasan terhadap Akuntabilitas Kinerja di Intansi Pemerintah Bireuen

(Studi Kasus pada Dinas Perdagangan, Pendisribusian, Koperasi dan UMKM Kabupaten Bireuen)

The Influence of Financial Report Quality and Supervision on Performance Accountability in Government Agencies in Bireuen

(Case Study at the Department of Trade, Distribution, Cooperatives, and MSMEs of Bireuen Regency)

Sura Annisa[1], Muhammad Ferdiananda Chadafi[2], Irne Aryanie [3]
[1-3] Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Kebangsaan Indonesia
Email: suraannisa45@gmail.com[1], ferdianandach@gmail.com[2]

Korespondensi penulis: suraannisa45@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the effect of financial reporting quality and supervision on performance accountability at the Department of Trade, Industry, Cooperatives, and SMEs of Bireuen Regency. This study employed a quantitative approach with an associative research design. The population and sample consisted of 44 employees selected using a saturated sampling technique. Data were analyzed using multiple linear regression with the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). The results indicate that financial reporting quality has a positive and significant effect on performance accountability. Supervision also has a positive and significant effect on performance accountability. Simultaneously, financial reporting quality and supervision have a positive and significant effect on performance accountability. The Adjusted R Square value of 0.871 indicates that 87.1% of the variation in performance accountability is explained by financial reporting quality and supervision, while the remaining 12.9% is influenced by other factors outside the research model.*

Keywords: *Financial Reporting Quality; Local Government; Multiple Linear Regression; Performance Accountability; Supervision.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas laporan keuangan dan pengawasan terhadap akuntabilitas kinerja pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Populasi sekaligus sampel penelitian berjumlah 44 pegawai dengan teknik sampel jenuh. Analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan *Statistical Package for the Social Sciences* (*SPSS*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja dengan nilai signifikansi 0,008 < 0,05. Pengawasan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja dengan nilai signifikansi <0,001 < 0,05. Secara simultan, kualitas laporan keuangan dan pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja dengan nilai signifikansi <0,001 < 0,05. Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,871 menunjukkan bahwa 87,1% variasi akuntabilitas kinerja dapat dijelaskan oleh kualitas laporan keuangan dan pengawasan, sedangkan 12,9% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian.

Kata Kunci: Akuntabilitas Kinerja; Kualitas Laporan Keuangan; Pemerintah Daerah; Pengawasan; Regresi Linear Berganda.

1. LATAR BELAKANG

Pemerintahan daerah sebagai organisasi sektor publik dituntut untuk mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, efektif, responsif, dan akuntabel (Dwiyanto, 2017; Wahyuni et al., 2026). *Good governance* tidak hanya berkaitan dengan proses administrasi, tetapi juga menekankan pentingnya pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan sumber daya publik

Naskah Masuk: 11 September 2026; Revisi: 16 Oktober 2026; Diterima: 13 November 2026; Terbit: 23 November 2026

dan capaian kinerja yang dihasilkan. Dalam konteks ini, setiap perangkat daerah memiliki kewajiban untuk mengelola keuangan secara bertanggung jawab serta menyampaikan laporan yang jelas, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik (Mardiasmo, 2018; Saputra & Maimunah, 2026). Akuntabilitas tidak hanya mencakup aspek keuangan, tetapi juga akuntabilitas kinerja, yaitu kemampuan pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Akuntabilitas kinerja tercermin dari kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai, sehingga menjadi dasar evaluasi dalam menilai efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat (Eviana & Kristianto, 2026).

Akuntabilitas kinerja merupakan elemen utama dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan program pemerintah. Akuntabilitas tidak hanya menjadi kewajiban pelaporan, tetapi juga sebagai alat evaluasi pencapaian target kinerja berdasarkan indikator, anggaran, dan manfaat yang diterima masyarakat (Mahsun, 2020). Fenomena yang terlihat di Kabupaten Bireuen menunjukkan bahwa hasil evaluasi kinerja pemerintah daerah masih belum memuaskan, tercermin dari nilai akuntabilitas yang belum mencapai kategori baik sehingga menunjukkan perlunya peningkatan dalam pencapaian dan pertanggungjawaban kinerja publik (Dewi et al., 2026; Rahman, 2023). Fenomena akuntabilitas kinerja di sektor publik masih menunjukkan bahwa laporan kinerja pemerintah belum sepenuhnya berorientasi pada pencapaian *outcome* yang memberikan nilai manfaat langsung bagi masyarakat, melainkan lebih menekankan aspek administratif dan pemenuhan formalitas dokumen pertanggungjawaban. Pada Pemerintah Kabupaten Bireuen, khususnya pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, penyusunan laporan kinerja masih menghadapi kendala dalam hal kejelasan indikator, pengukuran capaian berbasis hasil (*result-based*), serta transparansi publik.

Kondisi tersebut tercermin dari realitas di lapangan, di mana para pedagang pasar dibebankan berbagai pungutan, seperti biaya lapak harian sebesar Rp3.000, biaya kebersihan sebesar Rp2.000, serta biaya penerangan dan listrik sebesar Rp10.000. Bahkan, dalam perkembangan terbaru, pedagang juga dikenakan pungutan tahunan sebesar Rp3.000.000, sementara fasilitas yang diberikan pemerintah terbatas pada lapak yang disemen tanpa peningkatan sarana pendukung lainnya. Fenomena ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara beban biaya yang ditanggung masyarakat dengan manfaat layanan yang diterima, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai akuntabilitas kinerja dan orientasi pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan pendapat Bastian (2017) yang menyatakan bahwa akuntabilitas kinerja harus mencerminkan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau

kegagalan pencapaian tujuan organisasi berdasarkan indikator yang terukur dan dapat diverifikasi, bukan semata-mata keberhasilan penyelesaian kegiatan dan serapan anggaran.

Sejalan dengan kajian empiris sebelumnya, terlihat masih adanya ketidaksesuaian temuan terkait faktor-faktor yang memengaruhi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, sehingga menimbulkan *research gap* yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Studi yang dilakukan oleh Pamungkas (2019) dan Ramdhanu (2020) menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan serta pengawasan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah. Namun, hasil tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan penelitian Nurkhasanah (2019) dan Sari *et al.* (2023) yang menemukan bahwa pengawasan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja karena praktik penilaian masih lebih berorientasi pada kepatuhan administratif dibandingkan efektivitas pengendalian internal. Perbedaan hasil penelitian ini menegaskan adanya *empirical gap* terkait kontribusi variabel kualitas laporan keuangan dan pengawasan terhadap akuntabilitas kinerja, sehingga perlu dilakukan penelitian lanjutan dalam konteks Pemerintah Kabupaten Bireuen sebagai objek studi terbaru.

Kualitas laporan keuangan menjadi salah satu faktor fundamental dalam menilai akuntabilitas kinerja pemerintah. Laporan keuangan yang berkualitas wajib memiliki karakteristik relevan, dapat dipahami, andal, tepat waktu, serta dapat dibandingkan (A'iny, 2026; Nordiawan & Hertianti, 2016). Fenomena yang terjadi pada beberapa perangkat daerah di Kabupaten Bireuen menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam penyusunan laporan keuangan, seperti keterlambatan penyampaian dokumen, kurang lengkapnya bukti administrasi, serta belum meratanya pemahaman aparatur terhadap pengelolaan keuangan berbasis akuntabilitas (Amalia, 2023). Kendala terhadap kualitas laporan keuangan di Kabupaten Bireuen juga terlihat dari kesenjangan kompetensi aparatur, ketidaktepatan klasifikasi belanja, dan kelemahan dalam proses verifikasi dokumen pertanggungjawaban (Siregar & Rahmawati, 2022). Kondisi ini berdampak pada penurunan nilai transparansi publik, karena laporan keuangan belum sepenuhnya menjadi dasar evaluasi dan pengambilan keputusan berbasis kinerja. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas laporan keuangan merupakan bidang evaluasi penting sebagai pondasi terbentuknya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Susanto, 2021).

Fenomena terkait kualitas laporan keuangan pada instansi pemerintah masih menunjukkan berbagai kendala, termasuk pada Pemerintah Kabupaten Bireuen, khususnya pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM. Penyusunan laporan keuangan pada instansi tersebut masih cenderung berorientasi pada pemenuhan aspek administratif

dibandingkan dengan kualitas substansi informasi yang dihasilkan, sehingga laporan keuangan belum sepenuhnya mampu berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan berbasis kinerja. Kondisi ini tercermin dari masih ditemukannya ketidaktepatan waktu penyampaian laporan, belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi pelaporan keuangan, serta adanya ketidaksinkronan data pendukung antarbidang. Permasalahan tersebut mengindikasikan belum terpenuhinya karakteristik kualitatif laporan keuangan, seperti relevansi, reliabilitas, keterpahaman, dan keterbandingan sebagaimana dipersyaratkan dalam pelaporan keuangan sektor publik. Padahal, Mahsun (2016) menegaskan bahwa kualitas laporan keuangan harus mencerminkan informasi yang relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan, sementara Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa kualitas pelaporan keuangan yang baik merupakan fondasi utama dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas sektor publik. Selain kualitas laporan keuangan, faktor lain yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja adalah pengawasan. Pengawasan merupakan proses peninjauan, pengecekan, dan evaluasi sistematis terhadap kegiatan organisasi agar sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan (Siagian, 2019). Fungsi pengawasan melibatkan aktivitas monitoring, pendeteksian potensi penyimpangan, serta pemberian rekomendasi perbaikan sebagai bagian dari kontrol manajerial dan tata kelola birokrasi (Putra & Hamid, 2022). Dengan adanya pengawasan yang optimal, pelaksanaan anggaran dan program dapat diarahkan sesuai indikator kinerja.

Fenomena pengawasan di Kabupaten Bireuen juga masih menunjukkan berbagai tantangan yang berdampak pada kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Tantangan tersebut antara lain belum optimalnya peran aparat pengawasan internal, minimnya tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan, serta lemahnya kontrol terhadap efektivitas pelaksanaan program pada tingkat perangkat daerah (Rahman, 2023). Kondisi ini tercermin dari masih ditemukannya laporan kegiatan dan laporan keuangan yang belum sepenuhnya didukung oleh indikator kinerja yang terukur, serta belum maksimalnya fungsi supervisi terhadap pelaksanaan anggaran dan administrasi pertanggungjawaban. Akibatnya, potensi terjadinya ketidaksesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan masih relatif tinggi. Oleh karena itu, pengawasan menjadi instrumen evaluasi yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan sekaligus memperkuat akuntabilitas instansi pemerintah (Hendri & Winarno, 2023).

Keterkaitan antara kualitas laporan keuangan, pengawasan, dan akuntabilitas kinerja didukung oleh berbagai penelitian terdahulu. Penelitian Sari *et al.* (2023) dan Makalalag (2023) menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas instansi pemerintah. Selanjutnya, penelitian Ramdhanu (2019) dan Nurcahya

(2024) menyimpulkan bahwa pengawasan memiliki pengaruh yang kuat dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja sektor publik. Namun, hasil penelitian lain oleh Nurkhasanah (2019) menunjukkan bahwa pengawasan tidak selalu berpengaruh signifikan, sehingga fenomena ini penting untuk dikaji lebih lanjut. Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi karena akuntabilitas kinerja merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Peningkatan kualitas laporan keuangan serta penguatan fungsi pengawasan menjadi faktor utama dalam mendukung transparansi, efektivitas, dan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, kajian mengenai pengaruh kualitas laporan keuangan dan pengawasan terhadap akuntabilitas kinerja perlu dilakukan guna memberikan kontribusi dalam peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.

Adapun kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini terletak pada pengujian secara simultan pengaruh kualitas laporan keuangan dan pengawasan terhadap akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah daerah. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi empiris yang lebih spesifik pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM di Kabupaten Bireuen. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan penelitian selanjutnya serta bahan pertimbangan dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Atas dasar tersebut, peneliti merasa penting untuk melakukan kajian lebih mendalam melalui penelitian yang berjudul "Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan dan Pengawasan terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Pemerintah Kabupaten Bireuen (Studi Kasus pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM)" sebagai kontribusi ilmiah dan rekomendasi dalam peningkatan sistem tata kelola pemerintahan.

2. KAJIAN TEORITIS

Pengertian Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan. Akuntansi sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Untuk menciptakan akuntabilitas maka laporan keuangan yang disampaikan juga harus berkualitas. Kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya (SAP, 2017).

Menurut Tjiptono (2016) kualitas laporan keuangan adalah kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi. Laporan keuangan adalah suatu bentuk pertanggung jawaban dari kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh sebuah entitas. Laporan keuangan menurut PSAK No.1 tahun 2015 laporan keuangan adalah penyajian tersruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan ini menyajikan perjalanan sejarah sebuah entitas yang dikualifikasikan dalam nilai moneter. Laporan keuangan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuang tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan pada periode sebelumnya, juga dapat dibandingkan dengan perusaan lain. Menurut Mahmudi dalam Wiguna et al. (2021), indikator laporan keuangan yaitu sebagai berikut: relevan, andal (*realiability*), dapat dibandingkan, dapat dipahami.

Pengertian Pengawasan

Secara umum, pengawasan kualitas adalah kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dari tujuan serta rencana yang tekah digariskan. Menurut Nordiawan (2018). Menurut T. Hani Handoko (2016) Pengawasan adalah sebagai berikut: "Suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan kinerja standar pada perencaaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membadingkan kinerja aktual dengan stadar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber data organisasi atau pemerintah telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi atau pemerintah".

Menurut Angger Sigit Pramukti (2016) pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan unruk menilai dari pelaksanaan kegiatan apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan. Selanjutnya diutamakan pada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang dicapai. Pengawasan merupakan proses sistematis dalam memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan rencana, standar, dan ketentuan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Menurut Siagian (2017), pengawasan adalah suatu proses untuk mengamati dan menilai pelaksanaan pekerjaan agar sesuai dengan kebijakan, rencana, dan instruksi yang telah ditentukan. Sementara itu, Hasibuan (2018) menyebutkan bahwa pengawasan adalah upaya untuk mengarahkan dan mengendalikan aktivitas agar tidak menyimpang dari tujuan organisasi. Dalam konteks sektor publik, Mardiasmo (2018) menegaskan bahwa pengawasan merupakan mekanisme kontrol yang digunakan untuk memastikan penggunaan sumber daya publik dilakukan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan.

Berdasarkan referensi dari para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan keuangan daerah adalah suatu kegiatan atau proses pemantauan hasil dari kinerja pemerintahan daerah dalam segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah untuk menjamin perencanaan yang telah disusun sudah berjalan dengan efektif, efisien, dan ekonomis. Menurut Sutrisno (2019), indikator pengawasan dapat diukur melalui aspek-aspek berikut: penetapan standar dan prosedur pengawasan yang jelas sebagai pedoman dalam pelaksanaan fungsi control, pelaksanaan pemantauan secara berkala terhadap aktivitas dan proses organisasi untuk memastikan kesesuaian dengan rencana, pelaporan hasil pemeriksaan atau evaluasi sebagai bentuk pertanggungjawaban dan dokumentasi temuan, dan tindak lanjut dan pemberian tindakan korektif (*corrective action*) guna memperbaiki kesalahan, penyimpangan, atau ketidaksesuaian yang ditemukan.

Pengertian Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah

Akuntabilitas kinerja publik merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh seorang pemegang amanah terhadap orang atau bentuk yang meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas ini dilakukan sebagai bentuk transparansi daripada kegiatan operasional suatu perusahaan (Suparyanto dan Rosad, 2020). Mardiasmo (2018) dalam Suparyanto dan Rosad, (2020) mendefinisikan bahwa akuntabilitas kinerja publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawabandan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas kinerja (*accountability*) merupakan konsep yang lebih luas dari stewardship. Stewardship mengacu pada pengeiolaan atas suatu aktivitas secara ekonomis dan efisien tanpa dibebani kewajiban untuk melaporkan, sedangkan *accountability* mengacu pada pertanggungjawaban oleh seorang steward kepada pemberi tanggung jawab (Mardiasmo, 2018).

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target yang lelah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. (Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Perwujudan pertanggungjawaban ini kemudian disusun dan disampaikan dalam bentuk laporan yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) (Adiwirya & Sudana,

2015). Adapun indikator akuntabilitas kinerja pemerintah menurut Mahsun (2019) adalah sebagai berikut: Kejelasan Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, Pemanfaatan Hasil Kinerja.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk menganalisis pengaruh kualitas laporan keuangan dan pengawasan terhadap akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Bireuen. Penelitian dilaksanakan di Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen pada Januari hingga Juli 2026. Populasi penelitian berjumlah 44 pegawai PNS dengan teknik pengambilan sampel menggunakan non-probability sampling melalui metode sampling jenuh, sehingga seluruh populasi dijadikan sampel. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, riset internet, dokumentasi, dan studi pustaka dengan menggunakan skala Likert 1–5. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan SPSS 30 melalui uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, analisis deskriptif, regresi linear berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi (R^2) untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kabupaten Bireuen. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ (2,809 > 1,682) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,008 < 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi kualitas laporan keuangan yang disajikan oleh instansi, maka akan semakin meningkat pula tingkat akuntabilitas kinerja yang dicapai. Kualitas laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan publik yang memenuhi karakteristik kualitatif, seperti relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Informasi yang disajikan secara transparan dan akurat dalam laporan keuangan menjadi instrumen penting untuk mengukur efisiensi penggunaan anggaran serta pencapaian target kinerja organisasi. Dalam konteks penelitian ini, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kabupaten Bireuen yang menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mampu menyajikan bukti pertanggungjawaban yang valid, sehingga mendorong terwujudnya pelaporan kinerja yang akuntabel dan terukur.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sahra *et al.*, (2024), yang menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan

terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa sajian informasi keuangan yang andal dan transparan dapat meningkatkan kepercayaan publik serta mempermudah evaluasi capaian kinerja organisasi. Selain itu, temuan ini memperkuat teori akuntabilitas publik yang menegaskan bahwa pengelolaan finansial yang bermutu merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pengawasan terhadap Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan hasil pengujian statistik, terbukti bahwa Pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kabupaten Bireuen. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ (10,761 > 1,682) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin optimal dan ketat sistem pengawasan yang diterapkan, maka akan semakin meningkat pula tingkat akuntabilitas kinerja instansi tersebut. Pengawasan merupakan rangkaian fungsi manajemen yang bertujuan untuk mengevaluasi, memantau, dan mengoreksi pelaksanaan program kerja agar berjalan sesuai dengan rencana strategis dan regulasi yang berlaku. Keberadaan pengawasan baik pengawasan internal oleh pimpinan maupun pengawasan fungsional mampu meminimalisir potensi penyimpangan serta memastikan efisiensi dalam penggunaan sumber daya organisasi. Dalam konteks penelitian ini, pengawasan yang berjalan secara berkala di Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kabupaten Bireuen berhasil mendorong para aparatur untuk bekerja secara disiplin, efisien, dan berorientasi pada target pencapaian kinerja instansi.

Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan dan Pengawasan terhadap Akuntabilitas Kinerja

Kualitas laporan keuangan, dan pengawasan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja di intansi pemerintahan Kabupaten Bireuen. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ (145,593 > 3,23) dengan nilai signifikansi (sig) sebesar 0,000 < 0,05. Kualitas laporan keuangan dan pengawasan merupakan dua faktor yang saling mendukung dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kualitas laporan keuangan berkaitan dengan kemampuan laporan dalam menyajikan informasi keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Sementara itu, pengawasan berfungsi untuk memastikan bahwa penyusunan laporan dan pelaksanaan program kerja dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penelitian Rahmi *et al.* (2025) pada SKPD Kabupaten Bireuen menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah dan pengawasan kualitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas instansi pemerintah. Penelitian Rizki dan Rialdy

(2023) juga menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pemerintahan dan pengawasan kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Temuan tersebut mendukung pandangan bahwa penyajian informasi keuangan yang sesuai standar, disertai pengawasan yang efektif, dapat memperkuat pertanggungjawaban instansi pemerintah.

Laporan keuangan yang berkualitas dapat membantu memberikan informasi mengenai penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan secara jelas. Di sisi lain, pengawasan dapat memastikan bahwa informasi tersebut disusun secara benar dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kualitas laporan keuangan dan pengawasan yang berjalan secara optimal diharapkan mampu meningkatkan transparansi, ketepatan pertanggungjawaban, serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kualitas laporan keuangan memiliki peran penting dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja. Oleh karena itu, disarankan agar Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen terus meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan melalui penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) secara konsisten, peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan, serta pemanfaatan sistem informasi keuangan yang lebih optimal. Upaya tersebut diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dipahami, dan tepat waktu sehingga mampu mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

Pengawasan merupakan faktor yang berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Oleh karena itu, disarankan agar Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen memperkuat pelaksanaan pengawasan, baik melalui pengawasan internal maupun pengawasan oleh pimpinan. Pengawasan yang dilakukan secara berkala, objektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan membantu meminimalkan penyimpangan, meningkatkan kepatuhan terhadap prosedur kerja, serta mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja yang lebih baik.

Berdasarkan hasil penelitian, kualitas laporan keuangan dan pengawasan secara simultan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Oleh karena itu, disarankan agar Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen mengintegrasikan upaya peningkatan kualitas laporan keuangan dengan penguatan sistem pengawasan melalui evaluasi kinerja secara berkala, pembinaan kepada pegawai, serta peningkatan koordinasi antarbidang. Langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan tata

kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel sehingga mampu meningkatkan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

A'iny, Q. (2026). Pengaruh penggunaan QRIS dan literasi keuangan terhadap akuntabilitas laporan keuangan UMKM di Kota Malang: Peran mediasi transparansi. *Jurnal Riset Akuntansi, 4*(1). https://doi.org/10.54066/jura-itb.v4i1.4486

Ariyanto, S. (2020). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pelalawan tahun 2018. *Valuta, 6*(1), 41–54. https://doi.org/10.25134/jrka.v6i1.4376

Aulia, O. (2021). *Pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Pekanbaru.*

Bireuenkab. (2021). *Pemerintah Kabupaten Bireuen*. https://www.bireuenkab.go.id/halaman/intasi-pemerintahan

Dewi, D., et al. (2026). Pengaruh digital competence dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) terhadap kualitas laporan keuangan daerah melalui sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP): Studi kasus pada BPKAD Kabupaten Dompu. *Trending: Jurnal Manajemen dan Ekonomi, 4*(2). https://doi.org/10.30640/trending.v4i2.7441

Eviana, W. N., & Kristianto, D. (2026). Pengaruh kualitas laporan keuangan dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi: Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali. *Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi, 6*(2). https://doi.org/10.51903/jupea.v6i2.6823

Fitri, F. (2017). *Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Studi empiris pada SKPD Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau)* [Skripsi, Universitas Islam Riau].

Hasanuddin, R., Nurdin, N. N. N., & Natsir, N. (2024). The influence of financial report quality on performance accountability in the Regional Financial Management Agency of Mamasa Regency. *Green Inflation: International Journal of Management and Strategic Business Leadership, 1*(4), 276–287. https://doi.org/10.61132/greeninflation.v1i4.134

Istiqomah, L. (2021). *Pengaruh penerapan standar akuntansi dan pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Magetan* [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo].

Jalil, M. M. F., & Majid, J. (2022). Peran transparansi dalam memoderasi determinan kualitas laporan keuangan daerah. *Tangible Journal, 7*(1), 75–89. https://doi.org/10.53654/tangible.v7i1.254

Khairan, U., Ikhyanuddin, I., Murhaban, M., & Firdaus, R. (2024). Dampak penerapan akuntansi sektor publik dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terhadap pencegahan fraud (Studi kasus Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM), 2*(3), 371–386. https://doi.org/10.29103/jam.v2i3.10689

Khairani, A., Wancik, Z., & Oktarida, A. (2024). Pentingnya pengawasan, ketaatan peraturan, kejelasan sasaran anggaran, dan pemanfaatan teknologi informasi pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. *CURRENT: Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini, 5*(3), 516–533.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2021). *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 13 tentang penyajian laporan keuangan badan layanan umum*. https://www.ksap.org/sap/wp-content/uploads/2021/07/Buku-SAP-2021.pdf

Mahmudi. (2019). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah*. UPP STIM YKPN.

Mahsun, M. (2019). *Pengukuran kinerja sektor publik*. BPFE.

Makalalag, F. N., Tinangon, J. J., & Afandi, D. (2023). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA, 11*(1), 1308–1318. https://doi.org/10.35794/emba.v11i1.47157

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Andi.

Mawitriyani, A. (2023). *Pengaruh implementasi penganggaran berbasis kinerja, pemanfaatan sistem informasi, serta pengawasan keuangan terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah (Studi pada SKPD Kabupaten Temanggung)* [Skripsi, Universitas Islam Indonesia].

Mudrikah, F., & Ali, K. (2020). Pengaruh implementasi standar akuntansi pemerintah dan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi (Studi pada SKPD Kabupaten Lampung Timur). *Fidusia: Jurnal Keuangan dan Perbankan, 3*(2).

Muhammad, A. (2021). *Pengaruh pengawasan keuangan, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan terhadap kinerja anggaran berbasis value for money pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat* [Skripsi, Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia].

Muslimah, W., Taufik, T., & Rusli, R. (2023). Pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, sistem pelaporan, dan ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. *Jurnal Kajian Akuntansi dan Auditing, 18*(1), 1–15. https://doi.org/10.37301/jkaa.v18i1.99

Nasution, D. A. D. (2019). Pengaruh implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik, 9*(2), 30–43. https://doi.org/10.32663/jaz.v2i2.989

Nurkhasanah, I. (2019). *Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi penganggaran, pengawasan, dan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa* [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang].

Pamungkas, B. (2012). Pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan dan implikasinya terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. *Jurnal Ilmiah Ranggagading, 12*(2), 1–11.

Pasaribu, S. H. (2023). Pengaruh sumber daya manusia, standar akuntansi pemerintah, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Serambi Ekonomi dan Bisnis, 6*(2), 53–59. https://doi.org/10.55681/economina.v2i7.668

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Purnama Sari, T. (2023). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. *SEIKO: Journal of Management & Business*, *6*(1), 784–791.

Putra, G. H., Rivandi, M., & Zulvia, D. (2024). Dampak penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, kualitas laporan keuangan dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. *Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi, 2*(2), 281–295. https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v2i2.1899

Puyo, M. (2023). Kualitas laporan keuangan: Penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. *Kajian Ekonomi dan Bisnis*, *18*(2). https://doi.org/10.51277/keb.v18i2.176

Rahmawati, R., Ibrahim, I., Irma, I., Bunyamin, B., & Dahlan, A. (2024). Budget planning and internal control on local financial accountability: Mediating budget absorption. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, *7*(1), 72–86. https://doi.org/10.57178/atestasi.v7i1.755

Rahmi, R., Arliansyah, A., & Yunita, N. A. (2025). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah dan pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas instansi pemerintah (Studi kasus SKPD Kabupaten Bireuen). *Jurnal Akuntansi Malikussaleh*, *4*(1). https://doi.org/10.29103/jam.v4i1.19063

Ramadhani, D., & Halmawati, H. (2023). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah, dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan. *Jurnal Nuansa Karya Akuntansi*, *1*(2), 203–215. https://doi.org/10.24036/jnka.v1i2.16

Ramanda, D., et al. (2023). *Pengaruh penerapan akuntansi sektor publik, pengawasan kualitas laporan keuangan, dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah* [Skripsi, Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya].

Risqilah, M. (2023). *Pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Studi kasus pada SKPD Kabupaten Pekalongan)* [Skripsi, Universitas Pakuan].

Rizki, M. S., & Rialdy, N. (2023). Pengaruh penerapan akuntansi pemerintahan dan pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada Badan Keuangan dan Aset Daerah. *Jurnal Lentera Bisnis*, *12*(2). https://doi.org/10.34127/jrlab.v12i2.757

Rohmadani, I. (2023). *Pengaruh efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Madiun* [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo].

Ruqoyah, S. (2022). *Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah* [Skripsi, Universitas Komputer Indonesia].

Sadjiarto, A. (2018). Akuntabilitas dan pengukuran kinerja pemerintahan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, *2*(2), 138–150.

Sapitri, N. (2025). Pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), good governance, dan kualitas kinerja aparatur pemerintah terhadap kualitas laporan

keuangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon. *Aktiva: Jurnal Akuntansi dan Investasi*, *10*(1). https://doi.org/10.64620/jurra.v1i1.41

Saputra, I. P., & Maimunah, M. (2026). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan terhadap kepercayaan donatur pada organisasi nirlaba Yayasan Panti Asuhan di Kota Palembang. *JURIMEA: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi, 6*(2). https://doi.org/10.55606/jurimea.v6i2.2125

Septa, P. (2018). *Pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Kabupaten Ponorogo* [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo].

Silooy, R. (2023). Pengaruh penyajian laporan keuangan dan sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah: Studi empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Ambon. *Jurnal Akuntansi*, *9*(2), 72–90. https://doi.org/10.30598/jak.9.2.72-90

Surohman, S. (2020). *Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, pemahaman akuntansi, dan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada SKPD di Kota Metro* [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Metro].

Wahyuni, S. S., et al. (2026). Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, penerapan SPI, dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah: Studi empiris pada OPD di Kota Medan. *JURIMEA: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi*, *6*(2). https://doi.org/10.55606/jurimea.v6i2.2288